



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III**

**“Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam
Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**

Disusun oleh :

Nama	: Putri Khairunnisa, S.Psi
NIP	: 20010717 202504 2 012
Jabatan	: Analis Kebencanaan Ahli Pertama
Instansi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Kelas/Kelompok	: II
No. Absen	: 18
Angkatan	: XXXV (35)

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

2025

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

JUDUL : Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra
Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

NAMA : Putri Khairunnisa, S.Psi

NIP : 20010717 202504 2 012

PANGKAT/GOLONGAN : Penata Muda/III.a

JABATAN : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

INSTANSI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

ANGKATAN/KELOMPOK : XXXV/II

NO. ABSEN : 18

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember Tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Coach, Pasir Pengaraian, 12 Desember 2025
Penguji

Arfiga Wahyu, S.STP
NIP. 19900201 201010 1 001

Aji Fauji Farsa, S.STP, M.Kesos
NIP. 19880225 201010 1 001

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan

SARJAYADI, S.S., M.A.P
NIP. 19700304 199603 1 001

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada hari : Jumat
Tanggal : 12 Desember 2025
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan XXXV Tahun 2025

JUDUL	: Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu
NAMA	: Putri Khairunnisa, S.Psi
NIP	: 20010717 202504 2 012
PANGKAT/GOLONGAN	: Penata Muda/III.a
JABATAN	: Analis Kebencanaan Ahli Pertama
INSTANSI	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ANGKATAN/KELOMPOK	: XXXV/II
NO. ABSEN	: 18

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor, dan Coach/Moderator.

COACH

PESERTA

Arfiga Wahyu, S.STP

NIP. 19900201 201010 1 001

Putri Khairunnisa, S.Psi

NIP. 20010717 202504 2 012

PENGUJI

MENTOR

Aji Fauji Farsa, S.STP, M.Kesos

NIP. 19880225 201010 1 001

Boy Arta, S.IP

NIP. 19910225 201206 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Aktualisasi dengan judul **“Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**.

Laporan ini merupakan bagian dari Pelatihan Dasar CPNS dan bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjawab isu nyata di lingkungan kerja. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, penulis mengusulkan kerja sama dengan mitra eksternal agar pengelolaan logistik di BPBD dapat berjalan lebih optimal.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada fasilitator, widyaiswara, mentor, coach, serta seluruh pihak di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu atas dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi maupun sebagai langkah nyata dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pasir Pengaraian, 30 November 2025

Peserta

Putri Khairunnisa, S.Psi
NIP. 20010717 202504 2 012

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	i
BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	5
A. Profil Instansi	5
B. Profil Peserta	9
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI	12
A. Deskripsi Core Isu	12
B. Analisis Core Isu.....	16
C. Rumusan Isu.....	19
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu	21
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	23
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	23
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	24
C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)	37
D. Capaian Penyelesaian Core Isu	38
E. Manfaat terselesaikannya Core Isu.....	38
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	40
BAB V PENUTUP	42

A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Barang Logistik Yang Sudah Lewat Masa Kedaluwarsa Atau Telah Rusak Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dan Evaluasi Berkala Oleh Bidang Kedaruratan Dan Logistik Bpbd Kabupaten Rokan Hulu	13
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	23
Tabel 4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	24
Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi Nnd Pns	37
Tabel 4.4 Kondisi Core Isu.....	38
Tabel 4.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Bpbd Kabupaten Rokan Hulu.....	5
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bpbd Kabupaten Rokan Hulu	8
Gambar 2.3 Foto Peserta	9
Gambar 3.1 Diagram Analisis <i>Fishbone</i>	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Mingguan Minggu Ke-1	49
Lampiran 2. Laporan Mingguan Minggu Ke-2	58
Lampiran 3. Laporan Mingguan Minggu Ke-3	65
Lampiran 4. Laporan Mingguan Minggu Ke-4	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di instansi pemerintah. ASN memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar). Latsar CPNS tidak hanya menjadi syarat pengangkatan menjadi PNS, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai dasar ASN, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Sebagaimana tertera pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. CPNS diharapkan mampu menghayati dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam tugas kedinasan, sehingga menjadi ASN yang profesional dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern.

Sebagai bagian dari proses Latsar, peserta diwajibkan mengidentifikasi isu aktual di unit kerja dan menyusunnya dalam bentuk laporan aktualisasi. Hal ini bertujuan agar peserta dapat membuktikan kemampuannya dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN secara nyata melalui solusi terhadap permasalahan yang

ada. Di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu, salah satu isu aktual yang ditemukan adalah kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang BPBD. Selama ini, BPBD menghadapi tantangan signifikan terkait optimalisasi sumber daya logistik. Keterbatasan anggaran dan sumber daya internal, serta kurangnya sistem pengelolaan gudang yang modern, sering kali menghambat kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu ini dalam laporan aktualisasi berjudul **“Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Tujuan

Tujuan umum dari Aktualisasi ini adalah agar seorang ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta mengetahui kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dan diterapkan dalam segala aktifitas pekerjaan untuk membentuk karakter PNS profesional sebagai pelayan publik.

Tujuan khusus dari aktualisasi ini adalah mencari gagasan kreatif atas salah satu isu yang diangkat penulis yang mana nantinya mampu memberikan manfaat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan laporan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan aktualisasi ini akan di laksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan aktualisas/habituasi ini akan di lakukan pada 22 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025.
3. Pihak yang terlibat dalam kegiatan aktualisasi ini adalah Kepala Bidang yang juga sebagai mentor penulis, serta kepala seksi dan staf pada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
4. Kegiatan aktualisasi akan dilakukan dengan melakukan perjanjian kerja sama (MoU) dengan mitra eksternal untuk mengoptimalkan pengelolaan logistik BPBD Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

1. Profil BPBD Kabupaten Rokan Hulu



Gambar 2.1 Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimana peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisipatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tahun 2011 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu
Dalam Menghadapi Bencana.

b. Misi

1. Melindungi masyarakat Rokan Hulu dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha).
3. Meningkatkan koordinasi penanganan kedaruratan dan pemantapan dari dalam, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung,

termasuk logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

4. Meningkatkan kapasitas perencanaan dan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

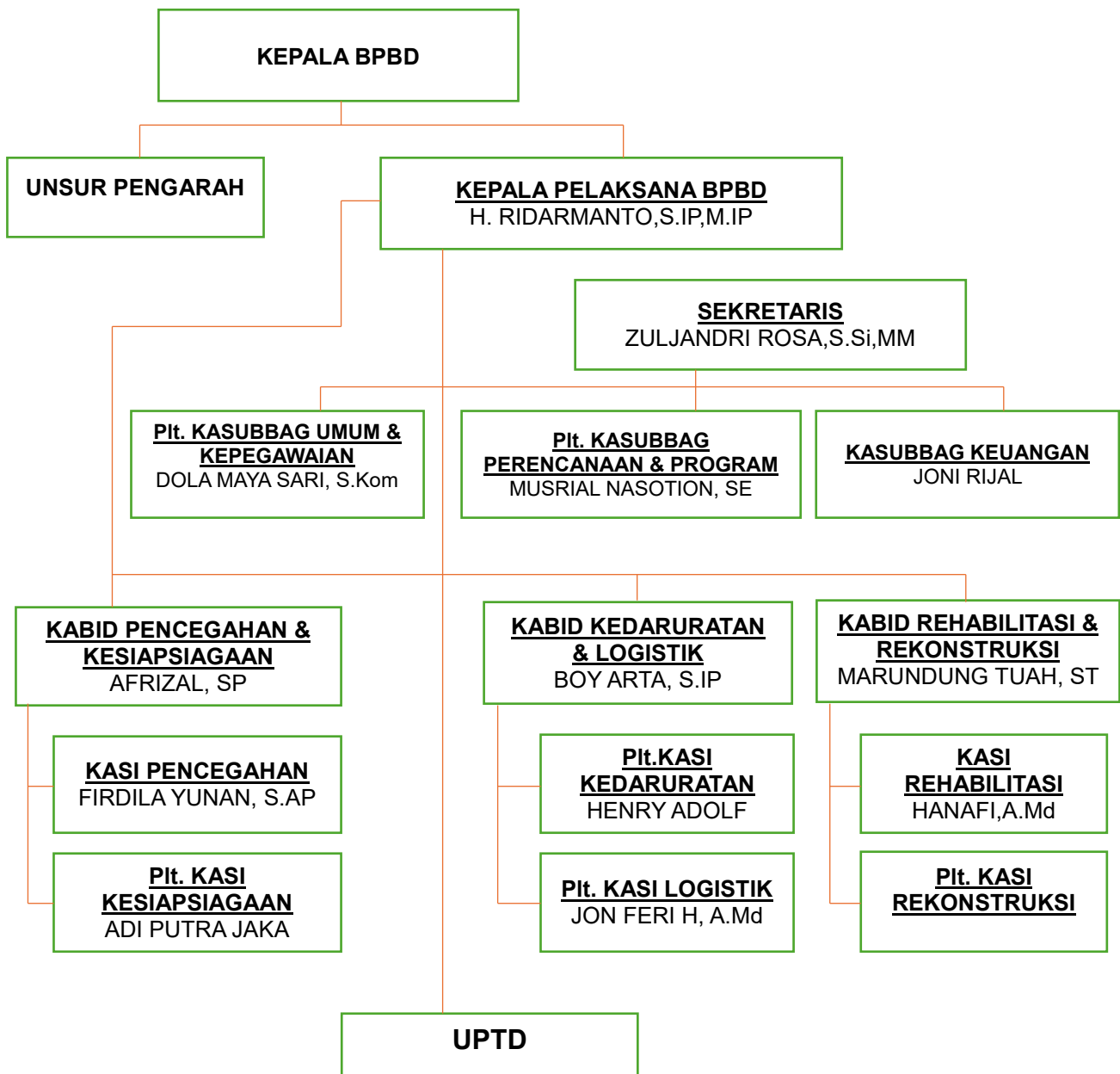
a. Tugas Organisasi

Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

b. Fungsi Organisasi

1. Menetapkan Pedoman Dan Pengarahan Terhadap Usaha Penanggulangan Bencana Yang Mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi Serta Rekonstruksi Secara Adil Dan Setara.
2. Menetapkan Standarisasi Serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyusun, Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
4. Menyusun Dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Kepala Daerah Setiap Bulan Sekali Dalam Kondisi Normal Dan Setiap Saat Dalam Kondisi Darurat Bencana.
6. Mengendalikan Pengumpulan Dan Penyaluran Uang Barang.
7. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Yang Diterima Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Struktur Organisasi BPBD Rokan Hulu



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hulu

B. Profil Peserta

1. Data Peserta



Gambar 2.3 Foto Peserta

NAMA : Putri Khairunnisa, S.Psi

NIP : 20010717 202504 2 012

Tempat/ Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 17 Juli 2001

Alamat Domisili : Dusun Kubu Patembang, Desa Suka Maju,
Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Prov.
Riau

Jabatan : Calon Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Rokan Hulu

Email : pkhairunnisa17@gmail.com

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 019 Rambah
MTs Negeri Rambah
SMK Negeri 1 Rambah
S1 Psikologi UIN Suska Riau

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi dan penyusunan norm, standar, prosedur dan kriteria.

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama meliputi:

- 1) Menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap pengaturan teknis bidang kebencanaan;
- 2) Melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
- 3) Melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;
- 4) Melakukan pengumpulan bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas;
- 5) Melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 6) Melakukan pengumpulan bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
- 7) Melakukan penelaahan kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;

- 8) Melakukan pengumpulan bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
- 9) Melakukan pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
- 10) Melakukan pengumpulan bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
- 11) Melakukan pengumpulan bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
- 12) Mengidentifikasi bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
- 13) Melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota;
- 14) Melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
- 15) Melakukan identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
- 16) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
- 17) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
- 18) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan.

BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Core Isu

Pelaksanaan aktualisasi ini disusun berdasarkan isu aktual yang telah diidentifikasi di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu, berikut adalah analisis isu-isu yang diangkat :

1. Kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu.

a. Kondisi Isu

Gudang logistik BPBD adalah benteng pertahanan terakhir bagi para korban bencana. Seharusnya, tempat ini menjamin ketersediaan bantuan yang prima. Namun, sebuah ironi sering terjadi saat bencana melanda dan logistik dibutuhkan, sebagian dari stok bantuan kemanusiaan justru ditemukan dalam kondisi kedaluwarsa atau rusak.

Pengelolaan penyimpanan logistik di BPBD Rokan Hulu saat ini belum berjalan secara optimal. Penyimpanan yang tidak optimal menimbulkan dampak serius terhadap respons bencana yaitu banyaknya logistik penanggulangan bencana yang kedaluwarsa saat disimpan di gudang. Barang-barang seperti makanan siap saji, obat-obatan, dan perlengkapan bayi menjadi tidak layak pakai (kedaluwarsa, berjamur, rusak dimakan hama), sehingga bantuan yang disalurkan berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi korban.

Tabel 3.1 Data barang Logistik yang sudah lewat masa Kedaluwarsa atau telah Rusak berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi berkala oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Barang	Jumlah / Satuan	Tanggal Kadaluarsa	Keterangan
1	Beras	126 Goni/ bungkus	-	Beras berkutu, berbubuk dan hancur
2	Makan Siap Saji (Nasi Goreng)	4 box (500 Sachet)	1 Desember 2024	Sebagian besar barang pada bungkus tidak bertulis masa <i>Expired</i>
3	Roti/Biskuit Malkis	126 bungkus	1 Desember 2024	Dalam Tas paket Sembako BNPB
4	Roti/Biskuit Roma	126 bungkus	1 Desember 2024	Dalam Tas paket Sembako BNPB
5	Roti/Biskuit Sari Gandum	126 bungkus	1 Januari 2025	Dalam Tas paket Sembako BNPB
6	Pembalut Wanita	50 Renteng	Tidak jelas/ tidak tertera	Kemasan dan Bentuk sudah Mulai Rusak

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang BPBD masih menghadapi berbagai kendala. Tabel ini secara jelas menunjukkan kegagalan dalam penerapan sistem pergudangan yang optimal, terutama prinsip FEFO (*First Expired, First Out*) dan pemeliharaan kualitas (*quality control*). BPBD berada di ambang kerugian aset negara yang besar dan yang lebih penting, risiko besar merugikan masyarakat jika logistik yang rusak atau kedaluwarsa ini disalurkan saat keadaan darurat. Perlu ada

tindakan segera untuk membenahi sistem penyimpanan dan pengawasan logistik.

b. Dampak Isu

1. Dampak terhadap Masyarakat

Kurang optimalnya penyimpanan logistik di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bukan hanya masalah internal birokrasi, melainkan isu kemanusiaan yang langsung membebani dan merugikan masyarakat saat mereka berada dalam situasi yang paling rentan. Dampak ini mengubah bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat menjadi sumber kekecewaan dan risiko.

Korban yang sudah berada dalam kondisi paling rentan dan sangat membutuhkan bantuan yang layak, justru terancam oleh makanan atau obat-obatan yang sudah basi. Alih-alih mendapatkan pertolongan, mereka berisiko mengalami masalah kesehatan seperti mual dan diare, menjadikan bantuan tersebut sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

2. Dampak terhadap Instansi

Saat terjadi bencana, waktu adalah segalanya. Gudang yang tidak teratur, dengan stok yang sulit diakses atau ditemukan, menyebabkan penundaan kritis dalam mobilisasi logistik. Ini merusak kemampuan instansi untuk bertindak cepat dan tepat. Kemudian, kasus logistik kedaluwarsa atau penemuan barang rusak yang disalurkan ke korban sering diliput media, menyebabkan penurunan kredibilitas dan citra BPBD di mata publik. Instansi dianggap tidak profesional dan tidak akuntabel dalam menjalankan tugas

kemanusiaan. Barang-barang yang harus dimusnahkan karena kedaluwarsa atau rusak dicatat sebagai kerugian aset negara. Ini menjadi temuan audit yang berulang dan menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan dana publik.

3. Dampak terhadap Pegawai

Kurang optimalnya penyimpanan logistik di gudang BPBD memiliki dampak signifikan yang dirasakan langsung oleh para pegawai dan staf teknis di instansi tersebut. Dampak ini terutama berkaitan dengan beban kerja, moral, dan risiko profesional. Ketika masyarakat mengkritik bantuan yang kedaluwarsa atau terlambat, kritikan itu secara tidak langsung ditujukan kepada para petugas di lapangan dan staf logistik. Hal ini dapat merusak citra profesionalisme dan moral mereka, seolah-olah usaha keras mereka tidak dihargai atau bahkan dicurigai. Kemudian Pegawai yang bertanggung jawab atas logistik berisiko menghadapi pertanggungjawaban hukum atau temuan audit terkait aset negara yang hilang atau rusak (termasuk barang kedaluwarsa).

c. Keterkaitan Isu

Isu kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak bisa dilepaskan dari substansi Agenda III, khususnya profil Manajemen ASN.

Masalah logistik, seperti barang kedaluwarsa dan penataan gudang yang kacau, bukanlah sekadar kendala fisik, melainkan merupakan indikasi kegagalan manajemen yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem penyimpanan logistik penanggulangan bencana adalah inti

dari manajemen aset dan administrasi yang harus dijalankan ASN secara tertib, efektif, dan akuntabel.

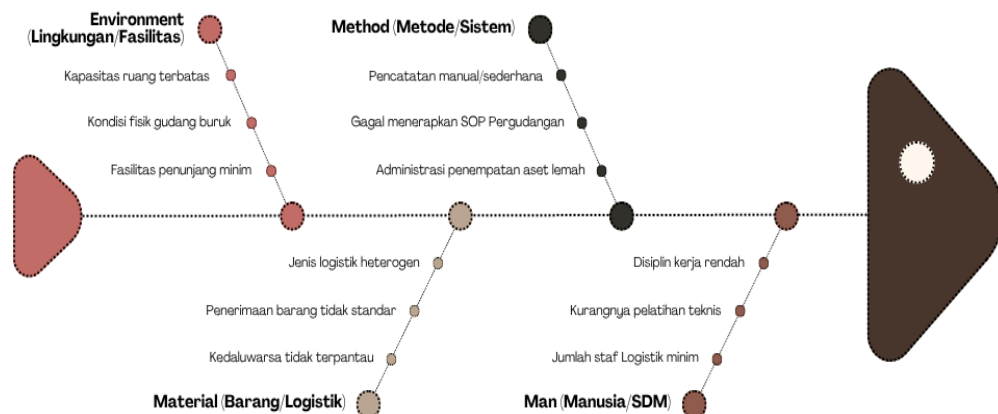
Ketika pengelolaan logistik tidak optimal yang diwujudkan melalui lambatnya respons atau kualitas bantuan yang buruk maka fungsi Manajemen ASN dalam mendukung pelayanan publik dan kesiapsiagaan darurat tidak berjalan maksimal. Ini menunjukkan kelemahan pada tiga aspek Kompetensi, Kinerja, Akuntabilitas.

Oleh karena itu, optimalisasi penyimpanan logistik akan secara langsung memperkuat tertib administrasi, mempercepat koordinasi antar unit kerja, serta meningkatkan transparansi dalam proses disposisi dan pengambilan keputusan. Upaya ini selaras penuh dengan prinsip Manajemen ASN yang menekankan pada efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja berorientasi hasil, memastikan ASN yang mengelola sistem logistik memiliki kompetensi tinggi, kinerja yang terukur, dan akuntabilitas yang transparan.

B. Analisis Core Isu

Pada isu dominan dalam pembahasan ini, yaitu kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu. Penulis menggunakan *Fishbone Analysis* sebagai metode untuk mengidentifikasi akar permasalahan. *Fishbone Analysis* merupakan diagram yang menggambarkan berbagai penyebab dari suatu isu spesifik melalui pengelompokan faktor-faktor utama, seperti aspek sumber daya manusia, metode kerja, sarana prasarana, regulasi, dan anggaran. Pendekatan ini membantu menemukan akar masalah secara lebih sistematis dan menjadi dasar penyusunan solusi jangka panjang agar penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu dapat lebih terintegrasi, akurat, dan efisien.



Gambar 3.1 Diagram Analisis *Fishbone*

Berdasarkan analisis menggunakan *fishbone* diagram, permasalahan utama “kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu” disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai fishbone diagram tersebut.

1. *Man* (Manusia/SDM)

Keterbatasan dan Kompetensi Pegawai

- Jumlah staf Logistik minim: Beban kerja tinggi, pengawasan stok tidak rutin.
- Kurangnya pelatihan teknis: Staf tidak menguasai prinsip FEFO/FIFO (*First Expired/In, First Out*) dan zonasi gudang.
- Disiplin kerja rendah: Kelalaian dalam pencatatan atau pemeliharaan kebersihan gudang.

2. *Method* (Metode/Sistem)

Sistem Manajemen Logistik yang Buruk

- Pencatatan manual/ sederhana: Tidak ada sistem informasi inventaris digital (SIMLOG) yang *real-time*.
- Gagal menerapkan SOP Pergudangan: Tidak ada denah gudang yang jelas dan penempatan logistik tidak berdasarkan jenis/kadaluwarsa.
- Administrasi penempatan aset lemah: Tidak ada label lokasi atau pelacakan barang yang masuk/keluar.

3. *Material* (Barang/Logistik)

Karakteristik dan Kontrol Kualitas Barang

- Kedaluwarsa tidak terpantau: Barang pangan (*fast-moving items*) menumpuk di tumpukan belakang.
- Penerimaan barang tidak standar: Bantuan/donasi diterima tanpa kontrol kualitas (cek kemasan/kedaluwarsa) yang ketat.
- Jenis logistik heterogen: Campuran barang pangan, sandang, obat, dan peralatan berat disimpan tanpa pemisahan yang memadai.

4. *Environment* (Lingkungan/Fasilitas)

Infrastruktur Gudang yang Tidak Memadai

- Kapasitas ruang terbatas: Kepadatan tinggi, penumpukan barang vertikal berlebihan.
- Kondisi fisik gudang buruk: Ventilasi dan pencahayaan minim, kelembapan tinggi, lantai retak/tidak rata, risiko hama.
- Fasilitas penunjang minim: Kurangnya pallet untuk mencegah kontak dengan lantai, tidak adanya alat berat (*hand pallet/forklift*), dan keamanan minim.

Analisis *fishbone* menunjukkan bahwa isu kurang optimalnya penyimpanan logistik BPBD Rokan Hulu merupakan masalah multifaktorial. Penyebabnya tidak hanya terletak pada keterbatasan fisik gudang (*Environment*), tetapi sangat kuat dipengaruhi oleh kelemahan sistem dan metode kerja ASN (*Method* dan *Man*).

Akar masalah terkuat adalah pada kategori *Method* dan *Man*. Kurang optimalnya sistem penyimpanan logistik dan kurangnya kompetensi staf dalam menerapkan penyimpanan dan pemeliharaan logistik menjadi pemicu utama kerusakan dan kedaluwarsa barang. Dampak langsung terlihat pada kategori *Material*, di mana barang pangan (seperti beras dan biskuit) rusak atau terancam kedaluwarsa massal karena kelalaian tata kelola.

Untuk menyelesaikan isu ini, BPBD harus fokus pada implementasi sistem penyimpanan logistik yang terintegrasi.

C. Rumusan Isu

Isu utama yang melatarbelakangi perlunya optimalisasi kerja sama dengan mitra eksternal adalah rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik bencana di BPBD Kabupaten Rokan Hulu, yang berpotensi menghambat kecepatan dan ketepatan respons saat terjadi bencana. Masalah ini berakar dari empat kategori penyebab utama: Manusia (SDM), Metode (Sistem), Material (Logistik), dan Lingkungan (Fasilitas). Pada aspek internal, ditemukan kendala signifikan seperti kurangnya pelatihan teknis dan jumlah staf logistik yang minim, diperparah oleh disiplin kerja yang rendah—semua mengarah pada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi untuk manajemen logistik yang kompleks. Kelemahan ini diperburuk oleh sistem yang tidak memadai, seperti pencatatan manual sederhana, kegagalan dalam menerapkan SOP Pergudangan yang baku, dan administrasi penempatan aset yang lemah, yang

secara kolektif menciptakan ketidakjelasan dan kesulitan dalam memantau stok dan aset secara real-time.

Selain masalah internal, tantangan juga muncul dari aspek material dan lingkungan fasilitas yang sangat mempengaruhi kapasitas BPBD. Pada aspek Material, masalah seperti jenis logistik yang heterogen, penerimaan barang yang tidak standar, dan kedaluwarsa yang tidak terpantau menunjukkan adanya kekurangan prosedur kontrol kualitas dan inventory management yang ketat, mengakibatkan potensi penyaluran bantuan yang tidak layak atau tidak tepat guna. Sementara itu, masalah Lingkungan (Fasilitas) menyoroiti kendala fisik yang mendasar, yaitu kapasitas ruang yang terbatas dan kondisi fisik gudang yang buruk, serta fasilitas penunjang yang minim. Kondisi fasilitas yang terbatas ini secara langsung membatasi kemampuan BPBD untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan logistik dalam skala besar, terutama saat tanggap darurat yang membutuhkan penampungan logistik dari berbagai pihak.

Berdasarkan analisis akar masalah ini, maka Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan internal dan fisik BPBD Rokan Hulu. Kerja sama ini bertujuan untuk menanggulangi defisit kapasitas, khususnya dalam aspek fasilitas penunjang (misalnya, pemanfaatan gudang mitra yang lebih memadai), keahlian (melalui pelatihan bersama atau sharing knowledge), dan standarisasi logistik (dengan menyepakati jenis dan kualitas bantuan). Dengan demikian, isu utama yang diangkat dalam laporan aktualisasi adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme kerja sama yang efektif dengan pihak luar agar keterbatasan SDM, fasilitas, dan sistem logistik internal dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan logistik bencana menjadi lebih cepat, terstruktur, dan

akuntabel—sebuah langkah krusial dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana di Kabupaten Rokan Hulu.

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Berdasarkan analisis penetapan isu yang sudah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode *fishbone*, maka gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu tersebut adalah **“Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut adalah:

1. Pelaksanaan persiapan dan perancangan terkait pengelolaan logistik bencana
 - a. Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi
 - b. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi
 - c. Pelaksanaan analisis terkait pengelolaan logistik penanggulangan bencana
 - d. Pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana
2. Pembuatan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana
 - a. Identifikasi Kebutuhan dan Mitra Potensial
 - b. Penyusunan Draf MoU
 - c. Konsultasi dan Koordinasi Internal

3. Penjajakan dan Penandatanganan MoU
 - a. Presentasi dan Negosiasi Konsep Sistem Deposit
 - b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama MoU
 - c. Sosialisasi Internal Staff Logistik
4. Penyusunan laporan aktualisasi
 - a. Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif
 - b. Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisasi

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan aktualisasi yang telah terlaksana:

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Oktober	November			
		IV	I	II	III	IV
1.	Pelaksanaan persiapan dan perancangan terkait pengelolaan logistik bencana (23-29 Oktober 2025)					
2.	Pembuatan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana (03-09 November 2025)					
3.	Penjajakan dan Penandatanganan MoU (10-23 November 2025)					
4.	Penyusunan laporan aktualisasi (24-30 November 2025)					

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Tabel 4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Identifikasi Isu	:	1. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kebakaran Hutan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu 2. Kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu 3. Pendataan Survei Verifikasi Lapangan Pascabencana Angin Puting Beliung Masih Dilakukan Secara Manual
Isu yang Diangkat	:	Kurang optimalnya penyimpanan logistik penanggulangan bencana di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu
Gagasan Pemecahan Isu	:	Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Pelaksanaan persiapan dan perancangan	1. Pembuatan draf surat persetujuan	Surat Persetujuan Mentor	Akuntabel. Penulis menyusun surat persetujuan sesuai aturan	Mentor	Tidak	-	-

	terkait pengelolaan logistik bencana	pelaksanaan aktualisasi		sebagai bentuk tanggung jawab administrasi. Loyal. Penulis mematuhi prosedur kedinasan dan mendahulukan kepentingan instansi Kompeten. Penulis menunjukkan kemampuan dalam tata naskah dinas dengan format yang benar.				
		2. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi	Lembar Konsultasi yang berisi catatan hasil konsultasi dan dokumentasi	Harmonis. Penulis membangun komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat dengan mentor. Kolaboratif. Penulis mengutamakan kerja sama dengan mentor untuk memperkaya gagasan.	Mentor	Tidak	-	-

				Adaptif. Penulis menerima masukan dan saran dengan terbuka untuk memperbaiki rencana yang telah disusun. Loyal. Penulis menghormati arahan mentor sebagai pembimbing dalam proses aktualisasi. Akuntabel. Penulis mendokumentasikan hasil konsultasi dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan.				
		3. Pelaksanaan analisis terkait pengelolaan logistik penanggulangan bencana	Lembar hasil analisis	Berorientasi Pelayanan. Penulis memastikan analisis yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	• Mentor • Pegawai BPBD	Tidak	-	-

				Akuntabel. Penulis menyajikan hasil analisis secara transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kolaboratif. Penulis melibatkan pegawai lain dalam proses pengumpulan data kebutuhan agar hasilnya lebih menyeluruh.				
		4. Pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana	Konsep/desain sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana	Berorientasi Pelayanan. Penulis memastikan sistem yang dibuat mampu mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Kompeten. Penulis memanfaatkan keterampilan teknis untuk merancang sistem yang sesuai kebutuhan.	• Mentor • Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tidak	-	-

				Kolaboratif. Penulis meminta masukan dari pegawai lain agar rancangan sistem lebih mudah digunakan bersama.				
2.	Pembuatan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana	1. Identifikasi Kebutuhan dan Mitra Potensial	Berita acara pemusnahan logistik BPBD yang kedaluwarsa	Akuntabel. Penulis mendapatkan data riil kerugian akibat penyimpanan buruk sebagai dasar negosiasi. Kompeten. Penulis menilai dan memilih mitra berdasarkan kapabilitas dan potensi mereka untuk memberikan kualitas sumber daya terbaik yang dibutuhkan untuk program Kolaboratif. Penulis secara aktif terbuka mencari dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk	• Mentor • Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik	Perbedaan Prioritas Kebutuhan mengenai jenis logistik mana yang paling mendesak dan mitra mana yang harus dipilih.	Tetapkan kriteria identifikasi dan seleksi mitra yang jelas dan terukur.	-

				berkontribusi (kemitraan) demi mencapai tujuan bersama.				
		2. Penyusunan Draf MoU	Draf MoU yang mencakup: Sistem Deposit, mekanisme penarikan cepat saat darurat.	Kolaboratif. Penulis mewujudkan semangat kolaborasi dengan memastikan draf MoU terbuka untuk masukan dari semua pihak terkait. Akuntabel. Penulis menyusun draf dengan cermat, transparan. Semua hak, kewajiban, dan potensi risiko harus dicantumkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten. Penulis menyusun draf MoU yang profesional dari segi substansi, bahasa hukum, dan tata naskah.	• Mentor	Tidak	-	-

				Berorientasi Pelayanan. Draf MoU dirancang untuk menjadi solusi atas kebutuhan publik yang telah diidentifikasi sebelumnya.				
		3. Konsultasi dan Koordinasi Internal	Notulen konsultasi dengan atasan terkait legalitas penitipan aset negara di gudang pihak ketiga.	Akuntabel. Penulis menyajikan semua data dan fakta terkait aset (jenis, jumlah, nilai) dan kondisi gudang pihak ketiga secara objektif dan transparan selama koordinasi. Harmonis. Berkoordinasi dengan suasana saling mendukung untuk mencapai pemahaman bersama terkait kerangka hukum penitipan aset.	Mentor	Tidak	-	-
3.	Penjajakan dan Penandatanganan MoU	1. Presentasi dan Negosiasi Konsep Sistem	Dokumentasi presentasi konsep win-	Pelayanan Publik. Penulis menjelaskan kepada mitra bahwa tujuan	Mitra Eksternal	Ketidaksepakatan tentang barang/logistik	Presentasi yang didasarkan pada data kebutuhan	

		Deposit	win (BPBD mendapatkan kualitas gudang, ritel mendapatkan citra CSR).	kemitraan adalah meningkatkan pelayanan logistik kepada masyarakat Kolaboratif. Dalam presentasi, Penulis membuka diri terhadap masukan, kritik, dan sudut pandang dari mitra atau <i>stakeholder</i> yang hadir. Akuntabel. Penulis menyajikan data, hitungan biaya, dan proyeksi manfaat sistem deposit logistik secara faktual dan jujur. Kompeten. Penulis menyajikan konsep sistem deposit logistik dengan argumen yang kuat, data pendukung yang valid, dan skema operasional yang logis.		apa saja yang masuk skema deposit, standar kualitas, jangka waktu penyimpanan, dan bagaimana mekanisme penarikan/penggantian/pengembalian logistik deposit tersebut.	nyata dan analisis risiko yang akurat. Keterbukaan dalam menjelaskan mekanisme, manfaat, dan biaya sistem deposit. Melibatkan semua stakeholder sejak awal untuk mendapatkan buy-in dan masukan.	
--	--	---------	---	---	--	---	---	--

				Harmonis. Membantu mitra memahami regulasi atau prosedur yang berlaku di instansi pemerintah, menciptakan hubungan kemitraan yang baik untuk kelanjutan kerja sama.				
		2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU).	Dokumen MoU yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala BPBD dan perwakilan ritel logistik.	Akuntabel. Mengikat komitmen mitra secara formal dan legal untuk menjaga aset negara. Kompeten. Penulis memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas dokumen dilakukan dengan cermat untuk menjamin kualitas terbaik dari dokumen yang sah secara hukum. Harmonis. Menciptakan suasana yang profesional dan penuh	• Mentor • Kepala Unit Kerja • Mitra Eksternal	Tidak	-	-

				penghormatan selama acara penandatanganan, menunjukkan apresiasi terhadap kesepakatan yang telah dicapai bersama.				
		3. Sosialisasi Internal Staff Logistik	Sosialisasi dengan staff logistik yang bertanggung jawab sebagai penghubung dan pengawas logistik yang dititipkan (deposit).	Adaptif. Staff harus merupakan personel yang proaktif dan mampu menyesuaikan diri dengan prosedur operasional baru atau perubahan mendadak di lapangan. Kompeten. Sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan berkualitas terbaik, memastikan seluruh anggota tim baru memahami konsep, prosedur, dan risiko sistem deposit logistik.	• Mentor • Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tidak	-	-

4.	Penyusunan laporan aktualisasi	1. Penyusunan draf laporan aktualisasi secara komprehensif	Kumpulan dokumentasi kegiatan	Akuntabel. Penulis menyusun laporan sesuai dengan data, tahapan, dan hasil kegiatan yang sebenarnya agar dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten. Penulis menuliskan laporan dengan sistematis, runtut, dan sesuai kaidah penulisan laporan kedinasan. Loyal. Penulis menyusun laporan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung program pengembangan kompetensi CPNS di instansi. Adaptif. Penulis menyesuaikan format dan isi laporan	Mentor	Tidak	-	-
----	--------------------------------	--	-------------------------------	---	--------	-------	---	---

				dengan arahan lembaga penyelenggara pelatihan maupun kebutuhan organisasi.				
		2. Pelaksanaan konsultasi akhir dengan mentor terkait laporan aktualisas	Draf laporan aktualisasi yang sudah disetujui oleh mentor	Akuntabel. Penulis mendokumentasikan hasil konsultasi akhir dan memastikan laporan sah sebagai bukti pertanggungjawaban. Kompeten. Penulis menindaklanjuti masukan mentor dengan melakukan perbaikan yang tepat dan cepat. Harmonis. Penulis menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dalam suasana penuh rasa hormat dan saling menghargai.	Mentor	Tidak	-	-

				Loyal. Penulis mengikuti arahan mentor serta prosedur kedinasan dalam proses pengesahan laporan. Kolaboratif. Penulis menerima masukan dari mentor untuk penyempurnaan laporan agar lebih berkualitas.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK)

Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitiasi NND PNS

No.	Mata Pelatihan	Kegiatan								Jumlah Aktualisasi per MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Berorientasi Pelayanan	2	2	1	1	1	1	-	-	4	4
2.	Akuntabel	3	3	3	3	2	2	2	2	10	10
3.	Kompeten	2	2	2	2	3	3	2	2	9	9
4.	Harmonis	1	1	1	1	2	2	1	1	5	5
5.	Loyal	2	2	-	-	-	-	2	2	4	4
6.	Adaptif	1	1	-	-	1	1	1	1	3	3
7.	Kolaboratif	3	3	2	2	1	1	1	1	7	7
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		14	14	9	9	10	10	10	10	42	42

D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi kerja sama dengan mitra eksternal dalam pengelolaan logistik bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Tabel 4.4 Kondisi Core Isu

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Sebelum diadakannya aktualisasi pengelolaan penyimpanan logistik di BPBD Rokan Hulu belum berjalan secara optimal. Penyimpanan yang tidak optimal menimbulkan dampak serius terhadap respon bencana yaitu banyaknya logistik penanggulangan bencana yang kedaluwarsa saat disimpan di gudang. Barang-barang seperti makanan siap saji, obat-obatan, dan perlengkapan bayi menjadi tidak layak pakai (kedaluwarsa, berjamur, rusak dimakan hama), sehingga bantuan yang disalurkan berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi korban.	Setelah diadakannya aktualisasi Optimalisasi kerja sama dengan mitra eksternal berhasil menyelesaikan isu utama penyimpanan logistik yang tidak optimal, ditandai dengan telah terjalin mekanisme <i>sharing</i> informasi dan pemanfaatan gudang/aset mitra untuk penyimpanan logistik yang sensitif terhadap suhu atau waktu kedaluwarsa. Kemudian dapat terjadi peningkatan kualitas penyimpanan. Dengan adanya kerja sama, BPBD memperoleh akses terhadap gudang mitra yang memenuhi standar, mengurangi kondisi fisik gudang yang buruk. Hal ini membuat logistik menjadi layak pakai dan aman untuk didistribusikan, meminimalisir risiko kesehatan bagi korban bencana. Selain itu, terbentuknya sistem pencatatan terpadu yang memuat tanggal kedaluwarsa dan kondisi logistik, yang secara rutin dimonitor bersama oleh staf logistik BPBD dan perwakilan mitra, menjamin akuntabilitas dan ketepatan kondisi barang bantuan.

E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

Terselesaikannya core isu melalui kegiatan aktualisasi memberikan manfaat nyata baik bagi individu peserta, instansi maupun para pemangku stakeholder yang terlibat. Manfaat diantaranya yaitu:

1. Bagi Penulis (Peserta Latsar / ASN)

- a. Penulis memperoleh pengalaman langsung dan keahlian dalam merancang mekanisme kerja sama MoU terkait pengelolaan logistik bencana.
- b. Penulis mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai Harmonis (membangun dan membina hubungan baik dengan mitra), Akuntabel (menjamin logistik tercatat dengan transparan dan benar), dan Adaptif (menciptakan solusi inovatif terhadap keterbatasan fasilitas dan SDM).
- c. Memberikan solusi konkret yang berdampak langsung pada peningkatan efisiensi kerja unit logistik, memperkuat peran ASN sebagai agen perubahan yang profesional dan berintegritas.

2. Bagi Instansi (BPBD Kabupaten Rokan Hulu)

- a. Mencegah kerugian negara akibat barang bantuan yang kedaluwarsa atau rusak, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas.
- b. Mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan dan SDM internal dengan memanfaatkan aset dan keahlian mitra eksternal, sehingga BPBD memiliki kapasitas logistik yang lebih besar dan terjamin kualitasnya saat terjadi bencana.
- c. Membentuk kerangka kerja sama yang terlembagakan dan berkelanjutan dengan pihak eksternal, sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip *Whole of Government* (WoG).

3. Bagi *Stakeholder* (Mitra Eksternal & Masyarakat)

- a. Bagi Mitra Eksternal: Menyediakan saluran dan standar yang jelas bagi mitra untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana, sehingga bantuan yang diberikan lebih terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
- b. Bagi Masyarakat/Korban Bencana: Menerima bantuan logistik yang terjamin kualitas dan kelayakannya, sehingga risiko masalah kesehatan akibat mengonsumsi atau menggunakan barang bantuan yang tidak layak dapat dihilangkan.
- c. Peningkatan Kepercayaan Publik: Mempercepat waktu respon dan distribusi bantuan dengan logistik yang akuntabel, pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPBD dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Tabel 4.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No.	Kegiatan Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan / Output yang Diharapkan
1.	Penyusunan Surat Edaran Resmi mengenai Prosedur Standar Logistik Kolaboratif dengan Mitra Eksternal.	3 Bulan Pasca Aktualisasi	Diterbitkannya Surat Edaran (SE) dari Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hulu yang mengesahkan SOP Kolaboratif menjadi Prosedur Baku Instansi dalam pengelolaan logistik bersama mitra, menjamin keberlanjutan sistem.
2.	Digitalisasi Sistem Pencatatan Logistik Bencana berbasis Shared Cloud atau Google Sheets terintegrasi.	6 Bulan Pasca Aktualisasi	Pengembangan dari sistem sederhana yang sudah dibuat menjadi Sistem Inventarisasi Logistik Digital yang dapat diakses <i>real-time</i> oleh staf BPBD dan perwakilan Mitra, memuat data lokasi, jenis, dan tanggal kedaluwarsa.
3.	Peningkatan Kapasitas SDM melalui <i>Training of</i>	Setiap 6 Bulan	Pelatihan bagi seluruh Staf Logistik BPBD dan perwakilan mitra eksternal

	<i>Trainers</i> (ToT) Sistem Logistik Kolaboratif.		mengenai penggunaan Sistem Inventarisasi Logistik Digital dan penerapan standar FEFO (<i>First Expired, First Out</i>) dalam gudang kolaboratif.
4.	Ekspansi Jaringan Kerja Sama Logistik ke Mitra yang lebih luas (misalnya, BUMN/BUMD atau Organisasi Keagamaan).	Mulai 1 Tahun Pasca Aktualisasi	Penandatanganan MoU baru dengan mitra tambahan untuk memperluas jangkauan <i>buffer stock</i> dan ketersediaan gudang berstandar di wilayah rawan bencana.
5.	Evaluasi Tahunan Efektivitas Kerja Sama Logistik.	Setiap Akhir Tahun Anggaran	Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja kolaborasi dengan seluruh mitra eksternal untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap SOP dan keberhasilan dalam meminimalkan kasus logistik kedaluwarsa/rusak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/Habitiasi Mata Pelatihan

a. Kegiatan Ke-1

Secara keseluruhan, Kegiatan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan aktualisasi dan berhasil merumuskan kerangka kerja yang jelas dan terarah, memastikan bahwa kegiatan aktualisasi selanjutnya memiliki landasan yang kokoh untuk membangun sistem kerja sama yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan respon BPBD Rokan Hulu.

b. Kegiatan Ke-2

Kegiatan ini sukses menciptakan produk inovatif berupa MoU kerja sama dan sistem sederhana yang tidak hanya menyelesaikan isu internal (logistik kedaluwarsa), tetapi juga mewujudkan konsep Optimalisasi Kerja Sama sebagai solusi berkelanjutan. Sistem baru ini menjamin logistik yang disalurkan kepada korban bencana menjadi aman, layak, dan akuntabel.

c. Kegiatan Ke-3

Kegiatan ini berhasil mensistematisasi konsep optimalisasi kerja sama. Kesepakatan formal ini menjamin bahwa sistem pengelolaan logistik yang telah dirancang dapat diterapkan secara berkelanjutan, sehingga menjamin ketersediaan dan kelayakan logistik bencana bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam rantai logistik memiliki pemahaman,

kemampuan, dan komitmen yang sama untuk menjaga kelayakan dan akuntabilitas logistik bencana.

d. Kegiatan Ke-4

kegiatan penyusunan laporan ini bukan sekadar tugas administrasi, melainkan pembuktian final atas kemampuan peserta Latsar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proyek perubahan yang signifikan dan berkelanjutan bagi instansi. Laporan ini menjadi bukti capaian aktualisasi yang memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas BPBD Kabupaten Rokan Hulu.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Gagasan kreatif yang dikembangkan dalam kegiatan aktualisasi berjudul “Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Gagasan ini berhasil mengubah kelemahan internal BPBD menjadi keunggulan komparatif dalam manajemen logistik. Solusi ini menunjukkan bahwa masalah kompleks dapat diatasi melalui sinergi Kolaboratif dan inovasi Adaptif, menjamin bahwa logistik bencana yang disalurkan kepada masyarakat senantiasa layak, aman, dan akuntabel.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Dari pelaksanaan aktualisasi ini, *core* isu dapat diatasi secara signifikan melalui implementasi gagasan Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal. Capaian ini diwujudkan melalui legalisasi kerja sama formal, yakni Penandatanganan MoU Resmi dengan mitra eksternal dan memanfaatkan gudang mitra yang memenuhi standar untuk penyimpanan logistik yang

sensitif terhadap masa kedaluwarsa. Hal ini tidak hanya secara fisik mengatasi keterbatasan fasilitas BPBD, tetapi juga membangun sinergi institusional yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian melalui sistem ini membuat risiko penyaluran bantuan yang tidak layak atau rusak berhasil diminimalisir, sehingga menjamin bahwa logistik yang diterima oleh korban bencana adalah aman dan berkualitas. Secara keseluruhan, aktualisasi ini membuktikan bahwa dengan menerapkan nilai Adaptif dan Akuntabel, BPBD Kabupaten Rokan Hulu mampu mengubah tantangan internal menjadi peluang perluasan kapasitas, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memastikan pelayanan logistik yang optimal kepada masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXXV Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi telah dilaksanakan dengan baik. Kami sangat berterimakasih atas bimbingan dan pendidikan selama diklat. Harapannya untuk masa yang akan datang, penyelenggara dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

a. Melakukan Pengembangan Sistem Digital

Instansi diharapkan mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan lebih lanjut Sistem Pencatatan Logistik Digital Sederhana menjadi platform berbasis cloud yang lebih terintegrasi. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas inventaris secara menyeluruh.

b. Melakukan Ekspansi dan Evaluasi Kemitraan

Diharapkan instansi menetapkan Tim Kerja Sama Logistik Permanen yang bertugas melakukan evaluasi kinerja kemitraan tahunan dan aktif menjalin kerja sama baru dengan BUMN/BUMD atau organisasi lain yang tersebar, guna memperluas jaringan *buffer stock* dan kapasitas penyimpanan yang memenuhi standar di lokasi-lokasi rawan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008).

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Indonesia. (2011). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu.

Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

Indonesia. (2021). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS.

Indonesia. (2021). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Mingguan Minggu Ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No 1	Pelaksanaan persiapan dan perancangan terkait pengelolaan logistik bencana
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	23-29 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Surat Persetujuan Pelaksanaan Aktualisasi 2. Foto konsultasi dengan mentor 3. Lembar Konsultasi dengan mentor 4. Berita acara pemusnahan logistik kedaluwarsa
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi:	1. Tahap Kegiatan 1 Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi Akuntabel, saya menyusun surat persetujuan sesuai aturan sebagai bentuk tanggung jawab administrasi. Loyal, saya mematuhi prosedur kedinasan dan mendahulukan kepentingan instansi. Kompeten, saya menunjukkan kemampuan dalam tata naskah dinas dengan format yang benar. 2. Tahap Kegiatan 2 Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi Harmonis, saya membangun komunikasi yang baik dan penuh rasa hormat dengan mentor. Kolaboratif, saya mengutamakan kerja sama dengan mentor untuk memperkaya gagasan. Adaptif, saya menerima masukan dan saran dengan terbuka untuk memperbaiki rencana yang telah disusun. Loyal, saya menghormati arahan mentor sebagai pembimbing dalam proses aktualisasi. Akuntabel, saya mendokumentasikan hasil konsultasi dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan. 3. Tahap Kegiatan 3 Pelaksanaan analisis terkait pengelolaan logistik penanggulangan bencana Berorientasi Pelayanan, saya memastikan analisis yang saya lakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akuntabel, saya menyajikan hasil analisis secara transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kolaboratif, saya melibatkan pegawai lain dalam proses pengumpulan data kebutuhan agar hasilnya

	lebih menyeluruh. 4. Tahap Kegiatan 4 Pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana Berorientasi Pelayanan, saya memastikan sistem yang dibuat mampu mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Kompeten, saya memanfaatkan keterampilan teknis untuk merancang sistem yang sesuai kebutuhan. Kolaboratif, saya meminta masukan dari pegawai lain agar rancangan sistem lebih mudah digunakan bersama.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	1. Tahap Kegiatan 1 Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi Melakukan penyusunan draf surat secara cermat, teliti, dan sesuai format atau standar baku yang berlaku di instansi untuk memastikan keabsahan dan kejelasan surat. Bukti fisik kegiatan/evidence: Surat persetujuan: surat yang telah disiapkan untuk persetujuan yang kemudian di tandatangani oleh mentor. 2. Tahap Kegiatan 2 Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi Menyampaikan isu dan gagasan kreatif secara jelas, terbuka terhadap masukan, dan aktif mendengarkan arahan mentor. Mencatat semua hasil konsultasi, saran, dan keputusan yang diberikan oleh mentor sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan aktualisasi sesuai arahan. Bukti fisik kegiatan/evidence: Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 3. Tahap Kegiatan 3 Pelaksanaan analisis terkait pengelolaan logistik penanggulangan bencana Mengolah dan menyajikan data logistik yang telah dimusnahkan karena kedaluwarsa secara jujur dan cermat tanpa manipulasi. Analisis dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan sistem pengelolaan logistik agar memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak secara cepat dan tepat. Bukti fisik kegiatan/evidence:

	Berita acara pemusnahan logistik kedaluwarsa 4. Tahap Kegiatan 4 Pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana Merancang sistem yang baru (kerjasama MoU) sebagai solusi atas masalah yang ditemukan. Bukti fisik kegiatan/evidence: Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	1. Tahapan Kegiatan 1 Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi Proses ini diawali dengan penyusunan surat permohonan persetujuan pelaksanaan aktualisasi yang ditujukan kepada mentor. Surat tersebut berisi rencana kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Kerja Sama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu.” Surat disusun secara sistematis dan sesuai format ketentuan, kemudian diserahkan kepada mentor untuk mendapatkan tanda tangan dan persetujuan. 2. Tahapan Kegiatan 2 Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi Proses: Setelah surat disetujui, dilakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas terkait isu dan gagasan kreatif pelaksanaan aktualisasi. Saya menyampaikan isu dan gagasan kreatif secara jelas, terbuka terhadap masukan, dan aktif mendengarkan arahan mentor. Kemudian mencatat semua hasil konsultasi, saran, dan keputusan yang diberikan oleh mentor sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan aktualisasi sesuai arahan. Kualitas produk: Diharapkan isu yang diangkat menjadi lebih fokus dan relevan setelah diselaraskan dengan pandangan mentor. Gagasan kreatif menjadi lebih realistis dan didukung oleh organisasi. 3. Tahapan Kegiatan 3 Pelaksanaan analisis terkait pengelolaan logistik penanggulangan bencana

	Proses: Pelaksanaan analisis ini dilakukan dengan mengolah dan menyajikan data logistik yang telah dimusnahkan karena kedaluwarsa secara jujur dan cermat tanpa manipulasi. Analisis dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan sistem pengelolaan logistik agar memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak secara cepat dan tepat. Kualitas produk: Diharapkan mampu memvalidasi isu yang diangkat dan secara jelas mengarahkan pada kebutuhan pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik yang baru. 4. Tahapan Kegiatan 4 Pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana Proses: Penulis merancang sistem yang baru yaitu pengelolaan logistik dengan sistem perjanjian kerja sama (MoU) sebagai solusi atas masalah yang ditemukan. Rancangan ini dilakukan dengan berkonsultasi dengan mentor dan juga staff lain. Kualitas produk: Diharapkan rancangan sistem pengelolaan logistik ini realistis, inovatif, dan terstruktur, serta potensinya untuk meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas pengelolaan logistik.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Kegiatan ini menghasilkan peta jalan yang jelas dan inovasi (sistem) yang memastikan logistik dapat direspons secara cepat, terintegrasi, dan profesional, yang merupakan inti dari ketangguhan. Sistem yang dirancang memastikan ketersediaan, ketepatan, dan kecepatan penyaluran bantuan logistik. Melalui analisis dan perancangan, organisasi dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya logistik (gudang, inventaris, personel) secara lebih efisien dan efektif, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat bagi korban bencana.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	1. Tahap Kegiatan 1 Pembuatan draf surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Akuntabel, jika draf dibuat secara tidak cermat atau tidak sesuai format baku. Hal ini menyebabkan draf harus direvisi berulang kali, membuang waktu pimpinan/mentor, dan menunjukkan rendahnya kualitas administrasi instansi. Loyal, draf surat mungkin melanggar tata naskah

	dinas atau tidak mencantumkan elemen persetujuan yang diwajibkan oleh aturan internal. Ini berpotensi menimbulkan masalah legalitas di kemudian hari. Kompeten, pimpinan/mentor menilai pegawai tidak profesional dan kurang terampil dalam tugas dasar kedinasan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan pegawai. 2. Tahap Kegiatan 2 Pelaksanaan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan kreatif serta pelaksanaan aktualisasi. Harmonis, jika konsultasi tidak dilaksanakan dengan harmonis maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik dengan mentor, sehingga dapat menjadi konflik terhadap pelaksanaan aktualisasi. Kolaboratif, jika gagasan kreatif dilaksanakan tanpa persetujuan penuh atau masukan mentor. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau penolakan saat implementasi, karena ide tidak selaras dengan prioritas atau sumber daya organisasi. Adaptif, jika Konsultasi tidak terbuka terhadap alternatif solusi yang lebih kreatif. Akibatnya, gagasan kreatif hanya berkutat pada perbaikan minor dan gagal mencapai lompatan kinerja yang signifikan. Loyal, jika penulis tidak menghormati arahan mentor maka pelaksanaan aktualisasi bisa tidak terlaksana dengan baik. Akuntabel, jika tidak ada pencatatan resmi atau notulen konsultasi yang cermat. Ini berarti tidak ada dasar pertanggungjawaban yang jelas atas arahan yang diberikan, berpotensi memicu keraguan. 3. Tahap Kegiatan 3 Pelaksanaan analisis terkait pengelolaan logistik penanggulangan bencana Berorientasi Pelayanan, jika analisis logistik tidak dilakukan secara kompeten, sistem yang dirancang berdasarkan analisis tersebut akan cacat. Pada saat terjadi bencana, logistik berisiko salah jenis, salah jumlah, atau terlambat mencapai korban. Hal ini secara langsung mengancam keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Akuntabel, jika analisis dilakukan secara asal-asalan atau datanya dimanipulasi untuk memenuhi narasi tertentu. Hal ini menghasilkan kesimpulan yang keliru mengenai masalah logistik yang ada, menyebabkan
--	---

	instansi salah mengambil keputusan pada solusi yang tidak diperlukan. Kolaboratif, jika pelaksanaan analisis ini tidak dilakukan dengan berkolaborasi melibatkan pegawai lain, maka data kebutuhan yang didapatkan bisa jadi tidak menyeluruh. 4. Tahap Kegiatan 4 Pembuatan rancangan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana Berorientasi Pelayanan, jika sistem logistik baru yang dirancang dengan buruk akan lambat, kompleks, dan tidak efisien saat dioperasikan di tengah kedaruratan. Akibatnya, bantuan kritis (makanan, obat-obatan, tenda) terlambat disalurkan kepada korban bencana. Kompeten, jika rancangan teknis sistem tidak dibuat dengan keahlian yang memadai. Sistem yang dihasilkan mungkin penuh bug, sulit dioperasikan, atau tidak terintegrasi dengan alur kerja nyata di lapangan, sehingga menjadi dokumen mati dan tidak dapat digunakan. Kolaboratif, jika rancangan dibuat secara <i>top-down</i> tanpa melibatkan staf logistik atau operator lapangan. Sistem baru tersebut tidak ramah pengguna, mempersulit pekerjaan, dan akhirnya ditolak oleh staf yang seharusnya menggunakannya.
--	--

b. Catatan pengendalian dengan mentor

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH MENTOR

Nama Peserta		: PUTRI KHAIRUNNISA		
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HILU		
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HILU		
No	Tanggal/ Waktu	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	24 Okt 2025	Konsultasi terkait isu dan gagasan kreatif	Langgutan sesuai arahan!	
2.	27 Okt 2025	Konsultasi terkait rencana sistem pengelolaan logistik Penanggulangan Bencana	Langgutan sesuai arahan!	
3.				
4.				
5.				

c. Catatan pengendalian dengan Coach

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH COACH

Nama Peserta		: PUTRI KHAIRUNNISA			
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	Tanggal/ Waktu	Uraian	Hasil capaian/ output	Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Tugu Tambusi KM. 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Telp:(0762)7392113;Fax:(0762)7392113
Kode Pos 28557;bpbd@rohanulu.go.id;e-mail:bpbd@rohanulu.go.id

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 300.2.5.1/BPBD-SET/X/2025/169

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BOY ARTA, S.IP**
NIP : 19910225 201206 1 005
Pangkat/ Golongan : Penata TK/II Ill.d
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Memberikan persetujuan kepada :
Nama : **PUTRI KHAIRUNNISA, S.Psi**
NIP : 20010717 202504 2 012
Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III.a
Jabatan : Calon Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Untuk melakukan kegiatan Aktualisasi dan Habitasi sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah diseminarkan pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan judul "Optimalisasi Kerjasama dengan Mitra Eksternal dalam Pengelolaan Logistik Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu" yang dilaksanakan mulai 22 Oktober- 28 November 2025.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Rokan Hulu, 22 Oktober 2025
MENTOR


BOY ARTA, S.IP
NIP. 19910225 201206 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.Tugu Tambusi KM. 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Telp:(0762)7392113;Fax:(0762)7392113
Kode Pos 28557;bpbd@rohanulu.go.id;e-mail:bpbd@rohanulu.go.id

BERITA ACARA PEMUSNAHAN LOGISTIK

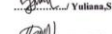
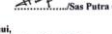
Nomor : 300.2/BPBD-KL/ II /2025 /

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Kantor BPBD Kabupaten Rokan Hulu** telah dilaksanakan pemusnahan logistik yang telah melewati masa Kadaluarsa dan Rusak pada saat Penyimpunan antara lain sebagai berikut :

No	Nama Barang Kadaluarsa	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Beras	Plastic/Goni(5 kg)	126	Beras dalam Paket Sembako BNPB
2	Makanan Siap Saji	Box / Sachet	4 / 500	Bantuan BNPB
3	Roti Malkis	Bungkus	126	Barang dalam Paket sembako BNPB
4	Roti Roma	Bungkus	126	Barang dalam Paket sembako BNPB
5	Roti Sari Gandum	Bungkus	126	Barang dalam Paket sembako BNPB
6	Pembalut Wanita	Resteng	50	Barang dalam Paket Hygiene Kda

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Petugas yang memusnahkan,

1. Kepala Bidang KL  **Boy Arta**
2. Plt.Kasi Logistik  **Henry Adolf**
3. Bendahara Barang  **Zailani**
4. Analis Kebencanaan Bidang KL  **Yuliana,SE**
5. Penata Penanggulangan Bencana Bidang KL  **Dedi Erlanda,SE**
6. Anggota TRC  **Sas Petra (Danton TRC)**

Mengetahui,
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hulu


H. RIDWAN MINTO, S.IP, M.IP
Pembina Nagama Muda/ IV.c
NIP. 19721006 199201 1 002

Lampiran 2. Laporan Mingguan Minggu Ke-2

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No 2	Pembuatan sistem pengelolaan logistik penanggulangan bencana
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	03-09 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Foto konsultasi dengan mentor 2. Lembar Konsultasi dengan mentor 3. Draf MoU
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi:	1. Tahap Kegiatan 1 Identifikasi Kebutuhan dan Mitra Potensial Akuntabel, saya mendapatkan data riil kerugian akibat penyimpanan buruk sebagai dasar negosiasi. Kompeten, saya menilai dan memilih mitra berdasarkan kapabilitas dan potensi mereka untuk memberikan kualitas sumber daya terbaik yang dibutuhkan untuk program Kolaboratif, saya secara aktif terbuka mencari dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi (kemitraan) demi mencapai tujuan bersama 2. Tahap Kegiatan 2 Penyusunan Draf MoU Kolaboratif, saya mewujudkan semangat kolaborasi dengan memastikan draf MoU terbuka untuk masukan dari semua pihak terkait. Akuntabel, saya menyusun draf dengan cermat, transparan. Semua hak, kewajiban, dan potensi risiko harus dicantumkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, saya menyusun draf MoU yang profesional dari segi substansi, bahasa hukum, dan tata naskah. Berorientasi Pelayanan, Draf MoU yang saya rancang diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan publik yang telah diidentifikasi sebelumnya. 3. Tahap Kegiatan 3 Konsultasi dan Koordinasi Internal Akuntabel, saya menyajikan semua data dan fakta terkait aset (jenis, jumlah, nilai) dan kondisi gudang pihak ketiga secara objektif dan transparan selama koordinasi. Harmonis, saya berkoordinasi dengan suasana saling

	mendukung untuk mencapai pemahaman bersama terkait kerangka hukum penitipan aset.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	1. Tahap Kegiatan 1 Identifikasi Kebutuhan dan Mitra Potensial Melakukan diskusi dengan pengguna sistem logistik di lapangan dan berkonsultasi dengan mentor/atasan. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait. Bukti fisik kegiatan/evidence: Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 2. Tahap Kegiatan 2 Penyusunan Draf MoU Menyusun draf dengan bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Memastikan ruang lingkup, hak, kewajiban, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa terdefinisi dengan baik. Mengkonsultasikan draf akhir kepada atasan/mentor sebelum diserahkan untuk proses penandatanganan Bukti fisik kegiatan/evidence: Draf MoU 3. Tahap Kegiatan 3 Konsultasi dan Koordinasi Internal Secara proaktif meminta masukan, mencatat semua hasil konsultasi dan koreksi dan memastikan poin-poin tersebut ditindaklanjuti. Bukti fisik kegiatan/evidence: Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	1. Tahapan Kegiatan 1 Identifikasi Kebutuhan dan Mitra Potensial Proses: Diawali dengan melakukan telaah terhadap dokumen lama. Kemudian melibatkan pihak-pihak terkait (staf gudang) untuk menggali masalah real-time yang dihadapi dalam pengelolaan logistik dan meminta pendapat terkait mitra yang potensial. Kualitas produk: Diharapkan dokumen data yang dikumpulkan valid sesuai dengan kebutuhan riil dan pemetaan pihak yang akan mendukung keberhasilan proyek (mitra potensial) dilakukan secara komprehensif. 2. Tahapan Kegiatan 2 Penyusunan Draf MoU Proses: Dilakukan dengan membuat perumusan struktur

	draf yang mencakup pihak yang terlibat, maksud, ruang lingkup, uraian teknis, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, pendanaan dan tata cara pembayaran, alat pembuktian, penyelesaian perselisihan, ketentuan penutupan. Kualitas produk: Diharapkan menghasilkan draf yang tegas dalam substansi (sesuai kebutuhan sistem logistik) dan kokoh dalam struktur legalitas, siap untuk ditandatangani dan diimplementasikan. 3. Tahapan Kegiatan 3 Konsultasi dan Koordinasi Internal Proses: Dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan dikonsultasikan, termasuk draf MoU dan poin-poin kunci yang memerlukan keputusan atau persetujuan pimpinan/mentor. Kualitas produk: Diharapkan menghasilkan produk berupa izin formal dan persetujuan substansi yang menandakan bahwa MoU telah diselaraskan dengan kebijakan dan kewenangan internal organisasi.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Kegiatan ini menghasilkan sistem pengelolaan logistik yang terencana, memastikan ketersediaan, penyimpanan, dan pemeliharaan logistik dalam kondisi siap pakai sebelum bencana terjadi. Kesiapan ini adalah fondasi ketangguhan. Kemudian, sistem ini membantu dalam melakukan inventarisasi kebutuhan (korban dan pengungsi), memprioritaskan penyaluran, dan memastikan bantuan tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	1. Tahap Kegiatan 1 Identifikasi Kebutuhan dan Mitra Potensial Akuntabel, jika identifikasi kebutuhan dilakukan tanpa data valid, analisis mendalam, atau kompetensi teknis yang memadai. Ini menyebabkan sistem logistik dibangun berdasarkan asumsi atau kepentingan subjektif, bukan kebutuhan riil. Kompeten, jika tidak dilakukan dengan kompeten maka sistem yang dibangun tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dalam pengelolaan logistik, kemudian Mitra yang teridentifikasi tidak diklasifikasikan dengan benar yang menyebabkan salah penanganan dalam koordinasi dan penyusunan MoU. Kolaboratif, jika pemetaan mitra dan kebutuhan dilakukan secara sepihak atau tertutup,

	mengabaikan unit internal kunci. Ini memicu mempersulit implementasi karena kurangnya rasa kepemilikan. 2. Tahap Kegiatan 2 Penyusunan Draf MoU Kolaboratif, jika MoU yang tidak disusun secara kolaboratif akan menciptakan hubungan kerja yang tidak solid, sehingga pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan dan operasional sistem logistik menjadi terhambat. Akuntabel, jika draf tidak disusun secara akuntabel mungkin menggunakan bahasa yang ambigu, menyebabkan salah tafsir di masa depan mengenai hak dan kewajiban. Hal ini akan menyulitkan implementasi sistem logistik dan memicu sengketa yang merugikan satuan kerja. Kompeten, jika substansi MoU menyimpang dari kebijakan strategis organisasi atau didorong oleh kepentingan pribadi, Masyarakat akan melihat instansi penanggulangan bencana sebagai organisasi yang tidak mampu bekerja sama dan tidak profesional, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap seluruh upaya penanggulangan bencana Berorientasi Pelayanan, jika tidak dilakukan dengan nilai berorientasi pelayanan, dampaknya akan merugikan baik mitra internal maupun eksternal, karena draf dokumen yang dihasilkan akan gagal memenuhi prinsip kecepatan, kejelasan, dan kepuasan stakeholder. 3. Tahap Kegiatan 3 Konsultasi dan Koordinasi Internal Akuntabel, bahan konsultasi yang disajikan tidak lengkap, tidak sistematis, atau tidak didukung data yang akuntabel. Pimpinan terpaksa membuat keputusan berdasarkan informasi yang bias atau cacat. Harmonis, kurangnya keterbukaan dan penghargaan terhadap masukan dari rekan kerja menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif, merusak semangat tim, dan menghambat kerja sama di fase implementasi.
--	---

b. Catatan pengendalian dengan mentor

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH MENTOR

Nama Peserta		Putri Khairunnisa		
Satuan Kerja		BPBD KABUPATEN BOJONEgara HULU		
Tempat Aktualisasi		BPBD KABUPATEN BOJONEgara HULU		
No	Tanggal/Waktu	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	03 NOV 2025	Konsultasi terkait identifikasi kebutuhan dan Mitra potensial	Lanjutkan sesuai arahan!	
2.	6 NOV 2025	Konsultasi dan koordinasi internal	Lanjutkan sesuai arahan!	
3.				
4.				
5.				

c. Catatan pengendalian dengan Coach

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH COACH

Nama Peserta		: PUTRI KHAIRUNNISA			
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	Tanggal/ Waktu	Uraian	Hasil capaian/ output	Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



MOU BPBD dengan Pengusaha Toko tentang Pengadaan Logistik 2025 [Compatibility Mode] - Microsoft Word (Product Activation Failed)

File Home WPS PDF Insert Page Layout References Mailings Review View

Clipboard Font Paragraph Styles Editing

Arial 12 Aa BbCcDdEe FgHjKlMnOpQrStUvwxyz 1 Normal 1 No Spacing Heading 1 Heading 2 Title Subtitle Subtitle Emp- Change Styles Find & Replace Create PDF Sign

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: B.300.2.9/BPBD-SET/ /2025

ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
PT. / CV.

TENTANG
MANAGEMEN DAN PENYEDIAAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H.RIDARMANTO,S.IP,M.IP
NIP : 19721006 199201 1 002
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rokan Hulu
Alamat Kantor : Kompleks Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA** sebagai Pemesan/Pembeli/Pengguna

2. Nama :
Jabatan :

Page: 1 of 4 Words: 848 3:16 PM 11/7/2025

Lampiran 3. Laporan Mingguan Minggu Ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No 3	Penjajakan dan Penandatanganan MoU
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	10-23 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Foto konsultasi dengan mentor 2. Lembar Konsultasi dengan mentor 3. MoU kerjasama 4. Foto saat melakukan presentasi dan negoisasi dengan mitra eksternal. 5. Foto saat briefing dengan staff logistik.
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi:	1. Tahap Kegiatan 1 Presentasi dan Negosiasi Konsep Sistem Deposit Pelayanan Publik, saya menjelaskan kepada mitra bahwa tujuan kemitraan adalah meningkatkan pelayanan logistik kepada masyarakat. Kolaboratif, pada saat presentasi, saya membuka diri terhadap masukan, kritik, dan sudut pandang dari mitra atau stakeholder yang hadir. Akuntabel, saya menyajikan data, hitungan biaya, dan proyeksi manfaat sistem deposit logistik secara faktual dan jujur. Kompeten, saya menyajikan konsep sistem deposit logistik dengan argumen yang kuat, data pendukung yang valid, dan skema operasional yang logis. Harmonis, saya membantu mitra memahami regulasi atau prosedur yang berlaku di instansi pemerintah, menciptakan hubungan kemitraan yang baik untuk kelanjutan kerja sama. 2. Tahap Kegiatan 2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU). Akuntabel, saya memastikan untuk mengikat komitmen mitra secara formal dan legal untuk menjaga aset negara. Kompeten, saya memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas dokumen dilakukan dengan cermat untuk menjamin kualitas terbaik dari dokumen yang sah secara hukum. Harmonis, saya menciptakan suasana yang profesional dan penuh penghormatan selama acara penandatanganan, menunjukkan apresiasi terhadap

	kesepakatan yang telah dicapai bersama. 3. Tahap Kegiatan 3 Sosialisasi Internal Staff Logistik Adaptif, tim harus dibentuk dengan personel yang proaktif dan mampu menyesuaikan diri dengan prosedur operasional baru atau perubahan mendadak di lapangan. Kompeten, sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan berkualitas terbaik, saya memastikan seluruh anggota tim baru memahami konsep, prosedur, dan risiko sistem deposit logistik.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	1. Tahap Kegiatan 1 Presentasi dan Negosiasi Konsep Sistem Deposit Penulis menyampaikan konsep sistem deposit logistik dengan menjelaskan tujuan, alur kerja, serta manfaat yang meyakinkan agar <i>stakeholder</i> dapat membayangkan manfaat dan nilai tambah sistem. Bukti fisik kegiatan/evidence: Foto saat melakukan presentasi dan negosiasi dengan mitra eksternal. 2. Tahap Kegiatan 2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU). Penulis mengawali dengan meminta tandatangan Kepala OPD, kemudian menemui ritel logistik untuk melakukan penanda tangan MoU. Bukti fisik kegiatan/evidence: MoU Kerja Sama. 3. Tahap Kegiatan 3 Sosialisasi Internal Staff Logistik Penulis melakukan sosialisasi dan briefing kepada rekan di bidang Logistik dengan menyampaikan konsep sistem deposit logistik secara jelas, manfaatnya bagi internal, serta menyediakan sesi Tanya Jawab (Q&A) untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan mengatasi resistensi awal. Bukti fisik kegiatan/evidence: Foto saat briefing dengan staff logistik.
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	1. Tahapan Kegiatan 1 Presentasi dan Negosiasi Konsep Sistem Deposit Proses: Mempresentasikan konsep sistem deposit logistik secara menyeluruh. Presentasi fokus pada manfaat

	bersama, khususnya bagaimana sistem ini mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan mitra (win-win solution). Kualitas produk: Diharapkan semua hal terkait kerjasama logistik telah disepakati tanpa ada poin vital yang menggantung. 2. Tahapan Kegiatan 2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU). Proses: Pimpinan atau perwakilan yang sah menandatangani semua salinan MoU/PKS, diikuti dengan pembubuhan stempel resmi organisasi. Kedua belah pihak secara simbolis bertukar salinan asli yang telah ditandatangani. Kualitas produk: Dokumen harus lengkap, ditandatangani oleh pihak yang berwenang, bermaterai cukup, dan tidak cacat hukum. 3. Tahapan Kegiatan 3 Sosialisasi Internal Staff Logistik Proses: Mengundang staff logistik untuk sesi presentasi/briefing, presentasi dilakukan dengan berfokus pada mengapa perubahan ini penting dan bagaimana sistem baru ini bekerja. Kualitas produk: Diharapkan staf logistik memiliki pemahaman yang sama mengenai alur kerja Sistem Deposit Logistik.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Kerjasama ini memungkinkan BPBD melakukan distribusi bantuan secara cepat ke lokasi terdampak, yang merupakan inti dari visi tangguh dan cepat. Kemudian, mengintegrasikan sistem informasi logistik antara kedua pihak, memungkinkan visibilitas penuh terhadap pengelolaan logistik, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	1. Tahap Kegiatan 1 Presentasi dan Negosiasi Konsep Sistem Deposit Berorientasi Pelayanan, jika negosiasi dilakukan tanpa mempertimbangkan efisiensi waktu, membuat proses berlarut-larut, dan menunda pencapaian manfaat sistem deposit bagi satuan kerja. Kolaboratif, Jika negosiasi dengan mitra eksternal gagal, sistem deposit logistik tidak akan terlaksana. Akibatnya, kecepatan dan efektivitas penanggulangan bencana akan tetap lambat dan

	berbiaya tinggi, merugikan masyarakat penerima manfaat. Akuntabel, jika presentasi/negosiasi tidak transparan mengenai biaya atau risiko, pimpinan akan kehilangan kepercayaan pada tim pelaksana. Kompeten, jika presentasi tidak dilakukan dengan kompeten, mitra eksternal akan meragukan kapabilitas satuan kerja dan menolak kerja sama. Harmonis, jika tim negosiasi tidak melibatkan unit internal lain atau mengabaikan masukan mereka, akan terjadi konflik dan resistensi saat implementasi. 2. Tahap Kegiatan 2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU). Akuntabel, jika penandatanganan yang tidak akuntabel (misalnya tidak menggunakan materai, tanpa validasi legal, atau ditandatangani oleh yang tidak berwenang) membuat MoU menjadi cacat hukum. Kompeten, jika tidak kompeten dalam menyusun/memeriksa naskah final, akan terjadi salah ketik, salah pasal rujukan, atau ketidakjelasan terminologi. Harmonis, jika tidak harmonis dalam seremonial penandatanganan akan merusak hubungan baik, membuat mitra enggan berkerja sama lagi di masa depan. 3. Tahap Kegiatan 3 Sosialisasi Internal Staff Logistik Adaptif, jika staff logistik tidak adaptif (tidak mau menerima prosedur baru atau teknologi dari mitra eksternal) akan menyebabkan sistem deposit gagal terintegrasi dan justru menghambat proses logistik yang sudah ada. Kompeten, jika sosialisasi yang buruk tanpa dasar kompetensi yang sesuai akan menyebabkan kesalahan fatal saat implementasi sistem deposit.
--	---

b. Catatan pengendalian dengan mentor

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH MENTOR

Nama Peserta		Putri Khairunnisa		
Satuan Kerja		BPBD KABUPATEN BOEAM HULU		
Tempat Aktualisasi		BPBD KABUPATEN BOEAM HULU		
No	Tanggal/Waktu	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	03 NOV 2025	Konsultasi terkait identifikasi kebutuhan dan mitra potensial	Lanjutkan sesuai arahan!	
2.	6 NOV 2025	Konsultasi dan koordinasi internal	Lanjutkan sesuai arahan!	
3.				
4.				
5.				

c. Catatan pengendalian dengan Coach

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH COACH

Nama Peserta		: PUTRI KHAIRUNNISA			
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	Tanggal/ Waktu	Uraian	Hasil capaian/ output	Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan





Lampiran 4. Laporan Mingguan Minggu Ke-4
a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No 4	Penyusunan Laporan Aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	24-30 November 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Foto konsultasi dengan mentor 2. Lembar Konsultasi dengan mentor 3. Foto peserta saat penyusunan laporan
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi:	1. Tahap Kegiatan 1 Penyusunan Draf Laporan Aktualisasi Secara Komprehensif Akuntabel, saya menyusun laporan sesuai dengan data, tahapan, dan hasil kegiatan yang sebenarnya agar dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, saya menuliskan laporan dengan sistematis, runtut, dan sesuai kaidah penulisan laporan kedinasan. Loyal, saya menyusun laporan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung program pengembangan kompetensi CPNS di instansi. Adaptif, saya menyesuaikan format dan isi laporan dengan arahan lembaga penyelenggara pelatihan maupun kebutuhan organisasi. 2. Tahap Kegiatan 2 Pelaksanaan Konsultasi Akhir Dengan Mentor Terkait Laporan Aktualisasi Akuntabel, saya mendokumentasikan hasil konsultasi akhir dan memastikan laporan sah sebagai bukti pertanggungjawaban. Kompeten, saya menindaklanjuti masukan mentor dengan melakukan perbaikan yang tepat dan cepat. Harmonis, saya menjalin komunikasi yang baik dengan mentor dalam suasana penuh rasa hormat dan saling menghargai. Loyal, saya mengikuti arahan mentor serta prosedur kedinasan dalam proses pengesahan laporan. Kolaboratif, saya menerima masukan dari mentor untuk penyempurnaan laporan agar lebih berkualitas.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik	1. Tahap Kegiatan 1 Penyusunan Draf Laporan Aktualisasi Secara Komprehensif

kegiatan/evidence	Penulis mengikuti pedoman penulisan terbaru yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara (LAN), menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri dengan aturan baku. Menggunakan tata bahasa, ejaan, dan format penulisan yang benar dan standar, menunjukkan keterampilan teknis penulisan yang memadai. Bukti fisik kegiatan/evidence: Foto peserta saat penyusunan laporan 2. Tahap Kegiatan 2 Pelaksanaan Konsultasi Akhir Dengan Mentor Terkait Laporan Aktualisasi Penulis menyampaikan hasil apa adanya, tidak melebih-lebihkan atau menyembunyikan kekurangan dan memastikan laporan yang disajikan benar-benar mencerminkan peningkatan layanan. Kemudian menyajikan bukti dengan cara yang profesional, terorganisir, dan mudah diperiksa, menunjukkan kecakapan teknis dalam pelaporan. Bukti fisik kegiatan/evidence: Lembar Konsultasi dengan mentor
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	1. Tahapan Kegiatan 1 Penyusunan Draf Laporan Aktualisasi Secara Komprehensif Proses: Menyusun draf laporan sesuai format dan sistematika baku yang ditetapkan. Memastikan narasi, tabel, dan lampiran terintegrasi dengan baik. Merumuskan secara eksplisit bagaimana setiap tahapan kegiatan menerapkan nilai Ber-AKHLAK Kualitas produk: Diharapkan laporan harus mengandung data yang valid, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta struktur penulisan harus sesuai pedoman dari lembaga penyelenggara (LAN), termasuk kerapian margin, penomoran halaman, dan penempatan gambar/tabel. 2. Tahapan Kegiatan 2 Pelaksanaan Konsultasi Akhir Dengan Mentor Terkait Laporan Aktualisasi Proses: Menyajikan draf laporan kepada mentor, fokus pada kegiatan, analisis dampak, dan refleksi nilai Ber-AKHLAK yang diterapkan. Kemudian melakukan perbaikan laporan berdasarkan arahan mentor. Jika laporan sudah disetujui, peserta menyiapkan halaman pengesahan dan meminta mentor untuk

	menandatangani halaman pengesahan sebagai tanda laporan telah diterima dan divalidasi. Kualitas produk: Diharapkan laporan dengan jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa kegiatan aktualisasi berkontribusi positif pada pencapaian Tugas Organisasi, Misi, dan Visi.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi	Kegiatan penyusunan laporan aktualisasi memastikan bahwa PNS baru tidak hanya tahu nilai Ber-AKHLAK, tetapi mampu menerapkannya untuk memberikan kontribusi nyata, yang pada akhirnya memperkuat kinerja organisasi dalam mencapai Visi dan Misi.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	1. Tahap Kegiatan 1 Penyusunan Draf Laporan Aktualisasi Secara Komprehensif Akuntabel, jika data, bukti, atau hasil kegiatan tidak akuntabel, ini menyebabkan laporan tidak dapat dipercaya dan menjadi bias. Kompeten, jika laporan disusun asal-asalan, tidak mengikuti kaidah penulisan yang benar, analisis data dangkal, dan solusinya tidak efektif. Hal ini mencerminkan kurangnya profesionalisme dan pemborosan sumber daya. Loyal, jika laporan yang tidak jujur atau tidak profesional berpotensi mencoreng nama baik instansi jika tersebar ke pihak luar. Adaptif, jika laporan tidak mencerminkan upaya pembelajaran atau perbaikan berkelanjutan. Solusi yang diajukan dalam aktualisasi tidak didasarkan pada analisis masalah terkini atau teknologi baru, sehingga organisasi sulit maju. 2. Tahap Kegiatan 2 Pelaksanaan Konsultasi Akhir Dengan Mentor Terkait Laporan Aktualisasi Akuntabel, ketika laporan yang tidak jujur disahkan oleh mentor, ini menjadi bukti nyata bahwa integritas birokrasi dikompromikan. Kompeten, laporan yang sudah disahkan seringkali menjadi dasar bagi program tindak lanjut atau kebijakan baru. Jika laporannya cacat, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan gagal dan merugikan publik. Harmonis, jika laporan disahkan meskipun ada indikasi konflik kepentingan, keputusan yang diambil akan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan umum. Loyal, jika aktualisasi yang disahkan ternyata tidak efektif, maka waktu, tenaga, dan anggaran negara

	yang dialokasikan dianggap sia-sia. Kolaboratif, konsultasi akhir yang tidak kolaboratif dapat menghasilkan laporan yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas keberlanjutan program, sehingga program yang bermanfaat bagi masyarakat bisa mandek.
--	--

b. Catatan pengendalian dengan mentor

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH MENTOR

Nama Peserta		: Putri Khairunnisa		
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN OKAN HULU		
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN OKAN HULU		
No	Tanggal/ Waktu	Uraian	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	29 Nov 2025	Konfirmasi akhir terkait laporan aktualisasi	Sesuai dengan fundamen!	
2.				
3.				
4.				
5.				

c. Catatan pengendalian dengan Coach

CATATAN PENGENDALIAN AKTUALISASI OLEH COACH

Nama Peserta		: PUTRI KHAIRUNNISA			
Satuan Kerja		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
Tempat Aktualisasi		: BPBD KABUPATEN ROKAN HULU			
No	Tanggal/ Waktu	Uraian	Hasil capaian/ output	Media Komunikasi (Telpon/ SMS/ Email/ Dll)	Paraf
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

